

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMY Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadjono, Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati, cetakan ke-9, 2020, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta.
- Halim, A. Ridwan, 1985, *Pengantar ilmu hukum dalam tanya jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Limbong, Benhard, 2012, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Murrad, Rusmadi, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung.
- Parlindungan, A.P, 1991, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Said, Muhama, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2011, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- , 2014, *Hukum Agraria*, Kencana, Jakarta.
- Smith, Adam, 1996, *Pasar Bebas, Keadilan Dan Peran Pemerintah*, Kanisius, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Soeroso, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Subagyo, P. Joko, 1999, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W, 2009, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan implementasi*, Kompas, Jakarta.

-----, 2019, *Bahan Kuliah Etodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Sutedi, Adrian, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran*, Sinar Grafika, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Penulisan Hukum

Ibrahim, Johannes, P. Lindawaty S. Sewu, Hassanain Haykal, 2013, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Konsistensi Penerbitan Kebijakan PPAP sebagai Upaya Menciptakan Struktur Perbankan Yang Sehat", *Jurnal Imu Hukum Litigasi Universitas Pasundan*.

Lukman, Marcus, 1996, "Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Bidang Perencanaan Dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasiona", Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung.

Sugiharso, Buchori, 2014, "Pelaksanaan Perubahan Data Fisik Sertifikat Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman", Tesis Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Wartini, Sri, 2007, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam *Sanitary And Phythosanitary Agreemant*, Studi Kasus: Keputusan Appellate Body WTO Dalam Kasus Hormone Beef Antara Uni Eropa Dengan Amerika Serikat", *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia*.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960

Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 160 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2555)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti

Kerugian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentanh Penatagunaan Tanah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah

Internet

<https://kbbi.web.id/cacat>, Diakses Pada Tanggal 13 April 2020, Pukul 16.35 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt556fa8a2b1100/arti-cacat-hukum/>, Diakses pada tanggal 13 April 2020, pukul 17.39 WIB

<http://repository.ut.ac.id/3974/1/ADPU4332-M1.pdf>, Diakses pada tanggal 15 April 2020, pukul 16.27 WIB

<https://www.hukum-hukum.com/2016/05/legalopinion--pemisahan-dan.html>, Diakses pada tanggal 19 Juni 2020, pukul 09.49 WIB.